

**ANALISIS KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MELALUI KJKS BMT
(STUDI PADA KOTA PADANG)**

Artikel



Oleh:

ZURNELIA SARI
57721/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

Analisis Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kota Padang)

Zurnelia Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang
Email: zurneliasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT di Kota Padang berupa dampak dari program. Populasi dalam penelitian ini adalah KJKS BMT yang berada di masing-masing kelurahan di Kota Padang yang berjumlah 104. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode simple random sampling, dengan sampel sebanyak 82 KJKS BMT. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan skala Guttman., Berdasarkan hasil analisis menunjukkan kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT yang berupa dampak dari program sangat baik. Pertama Perkembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin dengan persentase penilaian sebesar 93,02%. Kedua, Peningkatan Kualitas hidup Keluarga Miskin dengan Tersedianya Kebutuhan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan persentase penilaian 93,02%. Ketiga, Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia, Baik dari Segi Pengetahuan, Sikap maupun Keterampilan dengan persentase penilaian sebesar 80,62%. Keempat, Peningkatan Sarana/Prasarana Nagari/Kelurahan dengan persentase penilaian sebesar 95,35%. Kelima, Pengembangan Usaha Masyarakat Nagari/Kelurahan dengan persentase penilaian sebesar 100%. Dan tolak ukur yang ke enam yaitu Penguatan Kelembagaan KJKS BMT dengan Kelembagaan Lainnya dengan persentase penilaian sebesar 100%. Dalam penelitian ini disarankan: 1)Bagi pemerintahan dan pengelola agar mampu mempertahankan program ini dengan baik serta memperbaiki kekurangan seperti pemberian keterampilan kepada RTM dalam mengelola usahanya 2)Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat melakukan penelitian mengenai kinerja program dengan menggunakan indikator lainnya.

Kata kunci: Kinerja, Program Penanggulangan Kemiskinan, KJKS BMT, Kota Padang

Abstract

This Research aim to to know Performance Program of Rescue Poorness Through KJKS BMT in Padang City in the form of impact of program. Population in this research is KJKS BMT residing in the each sub district in Town Field amount to 104. this Research Sampel is determined with method of simple sampling random, with sampel counted 82 KJKS BMT. Source of data the used is primary data and data of sekunder. And analysis method the used is method qualitative by using scale of Guttman., Pursuant to result of analysis show program performance rescue of poorness through KJKS BMT which in the form of impact of program very good. First is Growth of Effort and Improvement Of Earnings of Impecunious Family with percentage of assessment equal to 93,02%. Second, Make-Up of the Quality of Impecunious Family life Availablely of Requirement of Base in Educational and Health with percentage of assessment 93,02%. Third, Make Up Of Quality Of Human Resource, Either From Facet Knowledge, Attitude and also Skill with percentage of assessment equal to 80,62%. Fourth, Make Up of Medium of sub district with percentage of assessment equal to 95,35%. Fifth, Development Of Effort Society of sub district with percentage of assessment equal to 100%. And yardstick which to six that is Reinforcement Of Institute of KJKS BMT with Other Institute with percentage of assessment equal to 100%. In this research is suggested: 1) from organizer and governance to be can maintain this program better, and to correct insufficiency with giving skill to RTM into manage bussiness 2) To researcher hereinafter, better earn to do research concerning program performance by using other indicator.

Keyword: Performance, Program of rescue Poorness, KJKS BMT, Padang City

1. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan. Organisasi pemerintah daerah (Pemda) merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 ayat (1); menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada ayat (2); menyatakan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada peraturan ini juga dijelaskan semua pendaan yang diperlukan bagi pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Pada saat ini sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan yang semua sumber pendanaanya berasal dari APBN/APBD.

Program yang sudah dilaksanakan seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP/PNPM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK/PNPM), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Program Prakarsa Pembangunan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Kredit Usaha Tani (KUT), Penyediaan beasiswa bagi keluarga miskin, memberikan perhatian atau tekanan pada kegiatan-kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan/perumahan, kegiatan sosial (pelatihan/beasiswa), peningkatan kemampuan dan keterampilan, peningkatan akses dan layanan bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah mengalokasikan dana anggaran yang cukup besar untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dalam bentuk belanja hibah, belanja bentuk sosial maupun dalam bentuk program/kegiatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mulai Tahun 2007 telah memberikan Kredit Mikro Nagari/Kelurahan (KMN/KMK) berupa bantuan modal usaha bagi keluarga miskin pada Nagari/Kelurahan. Program KMN/KMK ini merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan sharing dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2008 pemerintah daerah Kota Padang sudah merealisasikan alokasi dana anggaran melalui program KMN/KMK di 50 kelurahan di Kota Padang, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 50 kelurahan sebesar Rp 15.000.000.000,-. Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata pengelolaan melalui program

KMN/KMK kurang efektif. Berkaca dari program tersebut yang mengalami kegagalan, maka Pemerintah Kota Padang pada tahun 2010 merealisasikan alokasi anggaran Kredit Mikro Kelurahan (KMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Padang Amanah Sejahtera. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Padang Amanah Sejahtera ini merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada tahun 2010 tersebut Pemerintah Kota Padang merealisasikan anggaran KMK melalui KJKS BMT di 54 kelurahan, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp 300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan sebesar Rp 16.200.000.000,-. Alokasi dana anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Namun belum dapat dipastikan apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Jika program ini berjalan dengan baik maka seharusnya berdampak positif bagi tingkat pertumbuhan kemiskinan, dimana jumlah masyarakat miskin akan mengalami penurunan. Disamping itu, diharapkan program ini mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah sesuai dengan salah satu visi dan misi program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka peneliti perlu mengetahui bagaimana kinerja program yang dibuat oleh pemerintah ini, agar apa yang diharapkan tercapai, tidak mengalami kegagalan seperti program sebelumnya. Pengukuran kinerja ini sangat penting dilakukan karena hal itu diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan sesuatu

yang lebih baik. Pengukuran kinerja untuk program ini dilakukan dengan memperhatikan informasi nonfinansial, hal itu dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya suatu program/kegiatan (Mardiasmo, 2009). Di Kota Padang sendiri program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini sudah berjalan lebih kurang tiga tahun. Sebelumnya sudah ada penelitian tentang kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini. Namun dari hasil penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa kinerja program ini belumlah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal itu dikarenakan pada saat penelitian tersebut dilakukan program belum merata dilaksanakan dimasing-masing kelurahan. Sementara itu, untuk saat ini program tersebut sudah merata dilaksanakan dimasing-masing nagari/kelurahan.

2. TELAAH LITERATUR

2.1 Kinerja

2.1.1 Definisi Kinerja

Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2002) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi.

Sedangkan menurut Kane and Johnson dalam Afriana (2009) kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, *outcome* hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

2.1.2. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*). (Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Bertolak dari pengertian diatas, maka kinerja pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksana suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (Soleh dan Suripto, dalam Dewi , 2012).

2.1.3 Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

1. Kinerja Kebijakan
Kinerja kebijakan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah.
2. Kinerja Program
Apabila kinerja kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka kinerja program menjadi tanggungjawab dari para Kepala SKPD.

3. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah kinerja dari program, dengan demikian satu program dapat terjadi atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan atau para Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

2.1.4 Fungsi Indikator Kinerja

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah melaksanakannya.
3. Membangun bagi dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja.

2.1 5 Indikator Kinerja

1. Masukan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dengan meninjau distribusi sumber daya suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki

- telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
2. Keluaran yaitu segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
 3. Hasil yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memnuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
 4. Manfaat yaitu kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
 5. Dampak yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

2.2 Kemiskinan

2.2.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum. Baik untuk makan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setaraper orang 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Seseorang dikategorikan miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 211.726 atau sekitar Rp 7.000 per hari (Badan Pusat Statistik, 2010)

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan seseorang untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (1) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produktif, kesehatan), (2) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (3) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial, (4) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan barang dan jasa, (5) pengetahuan dan keterampilan, dan (6) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

2.2.2 Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 15 Tahun 2010, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga KJKS BMT yang dibentuk melalui program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. KJKS BMT yang ada berjumlah 104. Dan sampel pada penelitian ini berjumlah 82 KJKS.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan *Simple Random sampling* yang merupakan sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok yang menjadi responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Data sekunder yaitu data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan dapat

dipergunakan (Indriantoro dan Supomo, 1999).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi, dengan melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian ini.
2. Teknik observasi. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomen-fenomena yang ada.

3.6 Definisi Operasional

Program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT merupakan program pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi masyarakat miskin melalui lembaga keuangan mikro di masing-masing kelurahan, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Program ini sumber dananya berasal dari APBD Propinsi dan APBD Kota. Pengukuran kinerja atas program ini dilakukan berdasarkan indikator program khususnya dampak dari program.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT khususnya indikator dampak. Dimana kuesioner ini ditujukan kepada pengelola KJKS BMT dan rumah tangga miskin sebagai sasaran program. Kuesioner

ini disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan yang berpedoman pada panduan umum program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT Kota Padang.

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Guttman, dimana akan didapat jawaban yang tegas yaitu “ya-tidak”. Penelitian skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan (Sugiyono, 2006).

Jawaban dari responden, untuk skor tertinggi 1 dan skor terendah 0. Analisa pada skala Guttman ini dilakukan seperti pada skala likert.

3.8 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan ciri dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Metode analisis ini melalui pendekatan analisis data kuantitatif dan kualitatif.

3.9 Teknik Menjamin Keabsahan Data

Keabsahan data yang diperoleh di lapangan sangat perlu diperiksa kebenarannya sebelum dilakukan analisis data. Penjaminan keabsahan data, peneliti lakukan dengan beberapa cara antara lain:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti dalam memahami situasi sosial yang dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, sehingga data dan informasi dapat diperoleh dengan mendalam. Dengan kata lain, untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan memerlukan

pengujian kebenaran informasi dari lapangan, sehingga pengumpulan data tentang semua aspek yang berkaitan dengan kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT khususnya berupa dampak dari program dan kejadian penting dapat teruji keabsahan datanya dengan baik.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, yang perlu diamati adalah bagaimana dampak dari program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini, hal ini peneliti fokuskan pada RTM sebagai sasaran program serta pengelola.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Hal ini dilakukan dengan cara: (1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara/kuesioner, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, dan (5) membandingkan hasil wawancara/kuesioner dengan isi dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin

Dari hasil analisa dengan menggunakan kertas kerja penilaian terhadap tolak ukur perkembangan usaha dan peningkatan keluarga keluarga miskin di Kota Padang diperoleh hasil persentase penilaian sebesar 93,02% yang berarti sangat baik. Dari 43 responden sebanyak 40 orang menjawab terjadi perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan RTM setelah menerima pembiayaan dari KJKS BMT.

Bentuk perkembangan usaha antara lain: usaha jualan sate yang awalnya hanya punya satu gerobak sekarang sudah tiga gerobak yang beroperasi, bahkan dua diantaranya menggunakan motor (gerobak motor), dan sudah dapat menggaji beberapa karyawan. Usaha jualan makanan nasi ampela, yang awalnya menunya hanya sedikit sekarang sudah bertambah jumlah menunya. Usaha ayam ras pedaging pada awalnya hanya memiliki 200 ekor sekarang sudah memiliki 400 ekor. Ada juga RTM yang awalnya hanya punya satu usaha sekarang sudah bisa menambah usaha sampingan. Seperti RTM yang awalnya hanya punya usaha jualan pulsa elektrik sekarang sudah bisa juga jualan bensin ecer dirumahnya. Dan sebanyak 3 orang dari responden menjawab tidak terjadi perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Mereka beralasan masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka dikarenakan keadaan ekonomi yang sulit saat sekarang ini, sehingga usaha mereka sulit berkembang.

4.2 Peningkatan Kualitas hidup Keluarga Miskin dengan

Tersedianya Kebutuhan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Dari hasil analisa dengan menggunakan kertas kerja penilaian terhadap tolak ukur peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan tersedianya kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan diperoleh hasil persentase penilaian sebesar 93,02%, yang berarti sangat baik. Responden yang menjawab adanya peningkatan kualitas hidup dididang pendidikan dan kesehatan berjumlah sebanyak 40 orang, hal itu dibarengi dengan perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan mereka. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran keluarga miskin di Kota Padang terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan sangat baik.

Sementara itu untuk responden yang menjawab tidak adanya peningkatan kualitas hidup baik dari segi pendidikan maupun kesehatan dikarenakan bagi mereka biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik sangatlah mahal, sedangkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari pas-pasan saja.

4.3 Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia, Baik dari Segi Pengetahuan, Sikap maupun Keterampilan.

Dari hasil analisa dengan menggunakan kertas kerja penilaian terhadap tolak ukur peningkatan sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan diperoleh hasil persentase sebesar 80,62%, yang berarti sangat bagus. Dari 43 responden mereka menjawab untuk segi pengetahuan dan sikap ada peningkatan. Dari segi pengetahuan mereka menjawab memperoleh ilmu bagaimana berkoperasi dengan baik,

sedangkan dari sikap mereka lebih bertanggungjawab dan disiplin untuk membayar kewajiban mereka atas pembiayaan yang diberikan KJKS BMT kepada mereka dalam rangka modal usaha. Sementara itu dari segi keterampilan sebagian kecil mereka menjawab belumlah memperoleh keterampilan yang memadai dari program ini. Jika dinilai secara rinsi untuk keterampilan nilai persentasenya hanya 58,13% yang berarti rendah dan jauh dari harapan.

4.4 Peningkatan Sarana/Prasarana Nagari/Kelurahan.

Dari hasil analisa dengan menggunakan kertas kerja penilaian terhadap tolak ukur peningkatan sarana/prasarana nagari/kelurahan di Kota Padang diperoleh hasil persentase penilaian sebesar 95,35%, yang berarti sangat baik. Hasil jawaban dari 43 responden, sebanyak 41 orang menjawab adanya peningkatan sarana/prasarana di setiap kelurahan. Mereka menjelaskan dengan adanya KJKS BMT PAS di masing-masing kelurahan secara langsung sarana/prasarana di Kelurahan bertambah. Terbukti KJKS BMT menjadi wadah/lembaga keuangan mikro sebagai sarana kegiatan simpan pinjam masyarakat di masing-masing kelurahan. Fasilitas umum seperti balai pemuda yang awalnya tidak berfungsi sekarang berfungsi menjadi kantor KJKS BMT. Lahan/ruangan kosong yang ada di sekitar kantor Lurah menjadi tempat beroperasionalnya KJKS BMT PAS.

Selain itu, dengan adanya KJKS BMT tersedianya tempat pembayaran listrik, PDAM, isi pulsa, dan lain-lain. Selain itu, dalam Perwako nomor 15 tahun 2010 disebutkan bahwasannya disetiap kelurahan di Kota Padang masing-masingnya mendapatkan

imbalan jasa 5% dari SHU KJKS BMT apabila NPL dibawah 5%. Dana tersebut dinamai dengan dana pengembangan wilayah, sehingga dana ini bisa digunakan untuk membangun sarana/prasarana atau pengembangan wilayah kerja yang dibutuhkan oleh kelurahan.

4.5 Pengembangan Usaha Masyarakat Nagari/Kelurahan.

Dari hasil analisa dengan menggunakan kertas kerja penilaian terhadap tolak ukur perkembangan usaha masyarakat di masing Nagari/Kelurahan di Kota Padang diperoleh hasil persentase penilaian sebesar 100%, yang berarti sangat baik. Hasil jawaban kuesioner dari 43 responden sebanyak 43 orang menjawab adanya peningkatan, seiring dengan perkembangan usaha RTM otomatis mempengaruhi perkembangan usaha masyarakat di Nagari/Kelurahan lokasi program. Yang tadinya masyarakat hanya mempunyai usaha kecil dengan adanya lembaga keuangan KJKS BMT ini yang memudahkan masyarakat untuk mengakses modal, usaha mereka dapat berkembang menjadi usaha menengah keatas. Yang tadinya masyarakat belum mampu mempunyai modal usaha sekarang kendala modal tersebut dapat diatasi. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan 30% dari dana penyertaan Pemko boleh digunakan untuk membiayai usaha mikro/menengah (bukan RTM) di Kelurahan tersebut.

4.6 Penguatan Kelembagaan KJKS BMT dengan Kelembagaan Lainnya.

Dari hasil analisa dengan menggunakan kertas kerja penilaian terhadap tolak ukur penguatan kelembagaan KJKS BMT dengan kelembagaan lainnya diperoleh hasil persentase penilaian sebesar 100%, yang berarti sangat baik. Dimana

responden menjelaskan bahwasanya KJKS BMT di Kelurahan memang perlu penguatan dengan kelembagaan lainnya. Mulai dari tingkat kelurahan seperti: LKM, LPM, PNPM dan sebagainya. Selanjutna dengan Kecamatan dan BPMPKB Kota Padang, dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga perbankan seperti BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Hal itu dilakukan agar KJKS BMT menjadi lembaga mikro yang benar-benar kuat, handal, dan terpercaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dimana pengukuran kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT menggunakan indikator dampak. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang ini memberikan dampak yang signifikan. Dimana dari enam tolak ukur indikator dampak yang digunakan diperoleh hasil penilaian sebesar 93,67%, yang berarti sangat baik. Dampak yang sangat baik yang diberikan oleh program ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras serta partisipasi semua pihak yang terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan ini.

Untuk mempertahankan kesuksesan dan keberlangsungan dari program ini, diharapkan kepada semua pihak yang terkait mampu melaksanakan program dengan baik serta konsisten sesuai dengan peraturan yang ada (Perwako Nomor 15 tahun 2010). Sehingga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KJKS BMT) yang dibentuk dengan prinsip utamanya adalah pemberdayaan keluarga miskin tidak berubah menjadi Lembaga

Keuangan Mikro Syariah kapitalis yang mengutamakan keuntungan lembaga semata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan agar dampak yang diperoleh oleh program ini sebesar 93,67% yang berarti sangat baik dapat dipertahankan untuk kedepannya. Dalam perjalanan program ini kedepan diharapkan dukungan materiil maupun non materiil dari pemerintah daerah. Mengingat masa jabatan Kepala Daerah yang telah dibatasi untuk dua periode, apabila terjadi pergantian Kepala Daerah diharapkan program ini tetap menjadi program yang diunggulkan. Dengan cara demikian akan terjadi kesinambungan kebijakan, program, dan kegiatan yang arah dan orientasinya terokus ke satu titik, yakni tercapainya visi yang diharapkan yaitu penanggulangan kemiskinan. Namun perlu juga untuk diperhatikan dampak program dari segi keterampilan, karena persentase nilainya hanya sebesar 58,13%.

Pada penelitian ini menulis menemukan sedikit kendala yaitunya adanya beberapa kuesioner yang tidak balik dan tidak bisa diolah. Hal itu disebabkan oleh karena ketika penelitian dilakukan masing-masing KJKS BMT PAS sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba pemilihan KJKS BMT PAS terbaik se Kota Padang. adanya RTM yang tidak bersedia mengisi kuesioner. Untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya mampu mengukur kinerja program ini menggunakan indikator yang lain. Semoga peneliti selanjutnya tidak mengalami kendala keterbatasan dalam memperoleh data seperti yang penulis alami saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

- Berencana (BPMPKB) Kota Padang. 2010. *Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan Melalui Pengembangan KJKS BMT*
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, *Padang dalam Angka 2010-2011*
- Buletin Teknis Hibah. 2012. Melalui (www.ksap.org/files/BLTK-HBH.docx) [21/03/2013]
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dewi. 2012. *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT* (Studi Pada Kabupaten Agam dan Kota Padang). Tesis. Universitas Andalas
- Dwi. 2006. *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Forum Bisnis. 2013. Viva. Melalui (www.google.com) [17/04/2013]
- Indra, Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Jusmawati. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Nur Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metodologi Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Padang today. 2013. *Wawako Padang Mahyeldi terima Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM*. Melalui (www.padang.go.id/index.php) [21/07/2013]
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*
- Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang *Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Padang Amanah Sejahtera*
- Pinrangkab. 2013. *Pengertian hibah dan tata cara pengajuannya*. Melalui (www.ppkad.pirangkab.go.id/artikel-hibah) [29/04/2013]
- Smeru. 2003. *Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin* (Fokus: Pro-Poor Budgeting). Makalah disampaikan pada Pelatihan Fasilitator Kabupaten dan Koordinator Regional Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (F-KAB dan KR P2TPD). Yogyakarta, 24 Oktober 2002
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wikipedia. 2013. Definisi Istilah.
Melalui (www.google.com)
[03/04/2013]

2013. “*Wawako Padang Mahyeldi
Terima Penghargaan Koperasi*”.
Padang Ekspres. Halaman 9.